

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Partisipasi

Untuk mengetahui partisipasi KPUD dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di Kalimantan Utara penulis sampaikan dalam bentuk table sebagai berikut.

Table 3. 1

**Partisipasi Pemilih Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara
Tahun 2015**

No	Pilihan Jawaban	Hasil Pemilih	Persentase
1	Sangat Aktif	10	33.3%
2	Aktif	18	60%
3	Biasa Saja	2	6.6%
4	Tidak Aktif	0	0%
5	Sangat Tidak Aktif	0	0%
Jumlah		30	100%

Sumber : Hasil Penelitian

Table tersebut diatas menunjukkan bahwa mayoritas jawaban memilih dan merasa KPUD berpartisipasi aktif (60%), dan sangat aktif (33.3%) selama pelaksanaan pemilihan gubernur dan wakil gubernur di Kalimantan Utara, sedangkan pada tingkat biasa saja (6,6%).

2. Partisipasi Kampanye

Untuk mengetahui partisipasi KPUD dalam kampanye pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur di Kalimantan Utara penulis sampaikan dalam bentuk table sebagai berikut.

Table 3. 2

**Partisipasi Kampanye Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan
Utara Tahun 2015**

No	Pilihan Jawaban	Hasil Pemilih	Persentase
1	Sangat Aktif	4	13.3%
2	Aktif	15	50%
3	Biasa Saja	11	36.6%
4	Tidak Aktif	0	0%
5	Sangat Tidak Aktif	0	0%
Jumlah		30	100%

Sumber : Hasil Penelitian

Table tersebut diatas menunjukkan bahwa menurut masyarakat selama pelaksanaan kampanye KPUD aktif (50%), sedangkan yang memilih sangat aktif (13.3%), dan yang biasa saja (36.6%) dalam melaksanakan kampanye baik dalam bentuk pelaksanaan pawai kendaraan di jalanan, rapat umum di lapangan maupun pelaksanaan hiburan rakyat di jalan.

3. Pengawasan Pilkada

Untuk mengetahui partisipasi KPUD dalam pengawasan pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur di Kalimantan Utara penulis sampaikan dalam bentuk table sebagai berikut.

Table 3.3

Partisipasi Pengawasan Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur

Kalimantan Utara Tahun 2015

No	Pilihan Jawaban	Hasil Pemilih	Persentase
1	Sangat Aktif	6	20%
2	Aktif	23	76.6%
3	Biasa Saja	1	3.3%
4	Tidak Aktif	0	0%
5	Sangat Tidak Aktif	0	0%
Jumlah		30	100%

Sumber : Hasil Penelitian

Table tersebut diatas menunjukkan bahwa selama pelaksanaan pemilihan gubernur dan wakil gubernur Kalimantan utara menurut masyarakat KPUD berperan aktif (76.6%), dan sangat aktif (20%), sedangkan biasa saja (3%) dalam pengawasan proses jalannya pemilukada.

4. Menangkap Aspirasi

Untuk mengetahui partisipasi KPUD dalam menangkap aspirasi pemilih pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur di Kalimantan Utara penulis sampaikan dalam bentuk table sebagai berikut.

Table 3. 4

**Menangkap Aspirasi Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan
Utara Tahun 2015**

No	Pilihan Jawaban	Hasil Pemilih	Persentase
1	Sangat Aktif	2	6.6%
2	Aktif	18	60%
3	Biasa Saja	9	30%
4	Tidak Aktif	1	3.3%
5	Sangat Tidak Aktif	0	0%
Jumlah		30	100%

Sumber : Hasil Penelitian

Table tersebut diatas menunjukkan bahwa menurut masyarakat KPUD aktif (60%), sangat aktif (6.6%), biasa saja (30%), bahkan ada responden yang menyatakan bahwa aspirasi masyarakat dalam pemilukada tidak ditangkap oleh KPUD yaitu (3.3%) dalam hal menanggapi aspirasi masyarakat di pemilukada serentak tahun 2015.

5. Menanggapi Kebutuhan

Untuk mengetahui responsibilitas KPUD dalam menanggapi kebutuhan pemilih pada pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur di Kalimantan Utara penulis sampaikan dalam bentuk table sebagai berikut.

Table 3. 5

**Menanggapi Kebutuhan Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur
Kalimantan Utara Tahun 2015**

No	Pilihan Jawaban	Hasil Pemilih	Persentase
1	Sangat Tanggap	4	13.3%
2	Tanggap	19	63.3%
3	Biasa Saja	4	13.3%
4	Tidak Tanggap	3	10%
5	Sangat Tidak Tanggap	0	0%
Jumlah		30	100%

Sumber : Hasil Penelitian

Table tersebut diatas menunjukkan bahwa menurut masyarakat, KPUD tanggap (63%), sedangkan sangat tanggap dan biasa saja masing-masing sama (13.3%) dalam hal menanggapi kebutuhan pemilih pada pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur di Kalimantan Utara.

6. Menanggapi Keluhan

Untuk mengetahui responsibilitas KPUD dalam menanggapi keluhan pemilih pada pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur di Kalimantan Utara penulis sampaikan dalam bentuk table sebagai berikut.

Table 3. 6

Menanggapi Keluhan Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur

Kalimantan Utara Tahun 2015

No	Pilihan Jawaban	Hasil Pemilih	Persentase
1	Sangat Tanggap	5	16.6%
2	Tanggap	10	33.3%
3	Biasa Saja	14	46.6%
4	Tidak Tanggap	0	0%
5	Sangat Tidak Tanggap	1	3.3%
Jumlah		30	100%

Sumber : Hasil Penelitian

Table tersebut diatas menunjukkan bahwa jumlah terbesar yang menyampaikan keluhan dalam pelaksanaan pemilukada di Kalimantan Utara adalah memilih biasa saja (46.6%), sedangkan yang merasa tanggap (33.3%), bahkan ada yang menyatakan sangat tidak tanggap (3.3%).

7. Menyelesaikan Persoalan

Untuk mengetahui responsibilitas KPUD dalam menyelesaikan persoalan/perselisihan pada pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur di Kalimantan Utara penulis sampaikan dalam bentuk table sebagai berikut.

Table 3. 7

**Menyelesaikan Persoalan Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur
Kalimantan Utara Tahun 2015**

No	Pilihan Jawaban	Hasil Pemilih	Persentase
1	Sangat Tanggap	9	30%
2	Tanggap	10	33.3%
3	Biasa Saja	6	20%
4	Tidak Tanggap	5	16.6%
5	Sangat Tidak Tanggap	0	0%
Jumlah		30	100%

Sumber : Hasil Penelitian

Table tersebut diatas menunjukkan bahwa menurut masyarakat KPUD tanggap (33.3%) dan merasa KPUD sangat tanggap (30%), sedangkan biasa saja (20%) bahkan yang merasa tindak tanggap (16.6%) dalam menyelesaikan persoalan di pemilukada serentak.

8. Akses Informasi

Untuk mengetahui Transparansi KPUD dalam memberikan akses informasi pada pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur di Kalimantan Utara penulis sampaikan dalam bentuk table sebagai berikut.

Table 3. 8

Akses Informasi Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur

Kalimantan Utara Tahun 2015

No	Pilihan Jawaban	Hasil Pemilih	Persentase
1	Sangat Banyak	6	20%
2	Banyak	17	56.6%
3	Cukup Banyak	5	16.6%
4	Sedikit	2	6.6%
5	Sangat Sedikit	0	0%
Jumlah		30	100%

Sumber : Hasil Penelitian

Table tersebut diatas menunjukkan bahwa akses informasi yang diberikan KPUD kepada masyarakat banyak (56.6%), sedangkan cukup banyak (16.6%), bahkan yang menyatakan sedikit akses informasi pemilukada berjumlah (6.6%) selama pelaksanaan pemilukada.

9. Keterbukaan Aparatur

Untuk mengetahui keterbukaanpetugas/aparatur KPUD dalam penyelenggaraan pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur di Kalimantan Utara penulis sampaikan dalam bentuk table sebagai berikut.

Table 3. 9

Keterbukaan Aparatur Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur

Kalimantan Utara Tahun 2015

No	Pilihan Jawaban	Hasil Pemilih	Persentase
1	Sangat Terbuka	5	16.6%
2	Terbuka	15	50%
3	Biasa Saja	9	30%
4	Tertutup	1	3.3%
5	Sangat Tertutup	0	0%
Jumlah		30	100%

Sumber : Hasil Penelitian

Table tersebut diatas menunjukkan bahwa masyarakat merasa terbuka (50%), sedangkan sangat terbuka (16.6%) dan biasa saja (30%) bahkan ada yang menhatakan tertutup (3%) terhadap keterbukaan aparatur pemilukada gubernur dan wakil gubernur Kalimantan utara, artinya adalah KPUD terbuka kepada masyarakat pada penyelenggaraan pemilukada.

10. Keterbukaan Dana

Untuk mengetahui keterbukaan aliran penggunaan dana dari kas KPUD disampaikan secara terbuka kepada masyarakat dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di Kalimantan Utara penulis sampaikan dalam bentuk table sebagai berikut.

Table 3. 10

**Keterbukaan Dana Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan
Utara Tahun 2015**

No	Pilihan Jawaban	Hasil Pemilih	Persentase
1	Sangat Terbuka	2	6.6%
2	Terbuka	10	33.3%
3	Biasa Saja	12	40%
4	Tertutup	5	16.6%
5	Sangat Tertutup	1	3.3%
Jumlah		30	100%

Sumber : Hasil Penelitian

Table tersebut diatas menunjukkan bahwa masyarakat berasa biasa saja (40%), sedangkan terbuka (33.3%) sedikit yang mengatakan sanga terbuka (6.6%), bahkan yang mengatakan tertutup (16.6%) dan sangat tertutup (3.3%) terhadap KPUD terkait keterbukaan dana kas penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur Kalimantan utara

11. Sosialisasi

Untuk mengetahui transparansi KPUD dalam melakukan sosialisasi mengenai pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur di Kalimantan Utara penulis sampaikan dalam bentuk table sebagai berikut.

Table 3. 11

Sosialisasi Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara

Tahun 2015

No	Pilihan Jawaban	Hasil Pemilih	Persentase
1	Sangat Bersosialisasi	6	20%
2	Bersosialisasi	19	63.3%
3	Biasa Saja	4	13.3%
4	Sedikit Bersosialisasi	1	3.3%
5	Sangat Sedikit Bersosialisasi	0	0%
Jumlah		30	100%

Sumber : Hasil Penelitian

Table tersebut diatas menunjukkan bahwa masyarakat merasa KPUD bersosialisasi (63.3%), sedangkan sangat bersosialisasi (20%), dan bahkan ada yang mengatakan biasa saja (13.3%) dan sedikit bersosialisasi (3.3%) kepada masyarakat dalam penyelenggaraan pemilukada gubernur dan wakil gubernur Kalimantan utara. Secara umum masyarakat merasa KPUD sudah bersosialisasi.

12. Perlakuan Setara

Untuk mengetahui perlakuan setara/adil oleh KPUD kepada pemilih dalam pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur di Kalimantan Utara penulis sampaikan dalam bentuk table sebagai berikut.

Table 3. 12

**Perlakuan Setara Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan
Utara Tahun 2015**

No	Pilihan Jawaban	Hasil Pemilih	Persentase
1	Sangat Adil	4	13.3%
2	Adil	17	56.6%
3	Biasa Saja	8	26.6%
4	Tidak Adil	1	3.3%
5	Sangat Tidak Adil	0	0%
Jumlah		30	100%

Sumber : Hasil Penelitian

Table tersebut diatas menunjukkan bahwa masyarakat merasa adil (56.6%), sedangkan biasa saja (26.6%) bahkan ada yang menyatakan tidak adil (3,3%) dalam hal perlakuan setarara pada penyelenggaran pemilukada gubernur dan wakil gubernur Kalimantan utara.

13. Penyalahgunaan Wewenang

Untuk mengetahui penerapan hukum oleh KPUD dalam menindak tegas pegawai/petugas yang menyalahgunakan wewenang pada pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur di Kalimantan Utara penulis sampaikan dalam bentuk table sebagai berikut.

Table 3. 13

**Penyalahgunaan Wewenang Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur
Kalimantan Utara Tahun 2015**

No	Pilihan Jawaban	Hasil Pemilih	Persentase
1	Sangat Tegas	4	13.3%
2	Tegas	12	40%
3	Biasa Saja	11	36.6%
4	Tidak Tegas	3	10%
5	Sangat Tidak Tegas	0	0%
Jumlah		30	100%

Sumber : Hasil Penelitian

Table tersebut diatas menunjukkan bahwa masyarakat merasa KPUD telah tegas (40%), sedangkan biasa saja (36.6%) bahkan yang menyatakan tidak tegas (10%) terhadap penyalahgunaan wewenang pada pelaksanaan pemilukada gubernur dan wakil gubernur Kalimantan utara masyarakat merasa KPUD tegas.

14. Tindakan Anarkis

Untuk mengetahui penerapan hukum oleh KPUD dalam menindak tegas aksi tindakan anarkis yang terjadi pada pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur di Kalimantan Utara penulis sampaikan dalam bentuk table sebagai berikut.

Table 3. 14

Tindakan Anarkis Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur

Kalimantan Utara Tahun 2015

No	Pilihan Jawaban	Hasil Pemilih	Persentase
1	Sangat Tegas	14	46.6%
2	Tegas	13	43.3%
3	Biasa Saja	3	10%
4	Tidak Tegas	0	0%
5	Sangat Tidak Tegas	0	0%
Jumlah		30	100%

Sumber : Hasil Penelitian

Table tersebut diatas menunjukkan bahwa masyarakat merasa KPUD sangat tegas (46.6%) sedangkan yang menyatakan tegas (43.3%) terhadap tindakan anarkis yang terjadi dalam penyelenggaraan pemiluklada Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara.

15. Figgur Penyelenggara

Untuk mengetahui figgur penyelenggara dalam hal ini KPUD dalam hal pelaksanaan pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur di Kalimantan Utara penulis sampaikan dalam bentuk table sebagai berikut.

Table 3. 15

**Figgur Penyelenggara Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur
Kalimantan Utara Tahun 2015**

No	Pilihan Jawaban	Hasil Pemilih	Persentase
1	Sangat Memadai	4	13.3%
2	Memadai	25	83.3%
3	Biasa Saja	1	3.3%
4	Tidak Memadai	0	0%
5	Sangat Tidak Memadai	0	0%
Jumlah		30	100%

Sumber : Hasil Penelitian

Table tersebut diatas menunjukkan bahwa masyarakat merasa figgur penyelenggara memadai (83.3%) dalam hal ini KPUD dalam penyelenggaraan pemilukada gubernur dan wakil gubernur Kalimantan utara.

16. Faktor Parpol

Untuk mengetahui seberapa besar faktor partai politik mempengaruhi pemilih dalam menentukan pilihan dipemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur di Kalimantan Utara penulis sampaikan dalam bentuk table sebagai berikut.

Table 3. 16

**Faktor Parpol Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan
Utara Tahun 2015**

No	Pilihan Jawaban	Hasil Pemilih	Persentase
1	Sangat Mempengaruhi	10	33.3%
2	Mempengaruhi	13	43.3%
3	Biasa Saja	5	16.6%
4	Tidak Mempengaruhi	2	6.6%
5	Sangat Tidak Mempengaruhi	0	0%
Jumlah		30	100%

Sumber : Hasil Penelitian

Table tersebut diatas menunjukkan bahwa faktor partai politik mempengaruhi (43.3%), sedangkan biasa saja (16.6%) bahkan ada yang menyatakan tidak mempengaruhi (6.6%) pemilih dalam menentukan pemilihan dipilkada gubernur dan wakil gubernur Kalimantan utara.

17. Faktor Kandidat

Untuk mengetahui seberapa besar faktor kandidat/peserta pemilukada mempengaruhi pemilih dalam menentukan pilihan dipemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur di Kalimantan Utara penulis sampaikan dalam bentuk table sebagai berikut.

Table 3. 17

**Faktor Kndidat Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan
Utara Tahun 2015**

No	Pilihan Jawaban	Hasil Pemilih	Persentase
1	Sangat Mempengaruhi	20	66.6%
2	Mempengaruhi	9	30%
3	Biasa Saja	1	3.3%
4	Tidak Mempengaruhi	0	0%
5	Sangat Tidak Mempengaruhi	0	0%
Jumlah		30	100%

Sumber : Hasil Penelitian

Table tersebut diatas menunjukkan bahwa faktor kandidat sangat mempengaruhi (66.6%), sedangkan mempengaruhi (30%) pemilih dalam menentukan pilihan dipemilukada gubernur dan wakil gubernur Kalimantan utara.

18. Faktor Isu Kebijakan/Janji Politik

Untuk mengetahui seberapa besar faktor isu kebijakan/janji politik mempengaruhi pemilih dalam menentukan pilihan dipemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur di Kalimantan Utara penulis sampaikan dalam bentuk table sebagai berikut.

Table 3. 18

**Faktor Isu Kebijakan/Janji Politik Pemilukada Gubernur dan Wakil
Gubernur Kalimantan Utara Tahun 2015**

No	Pilihan Jawaban	Hasil Pemilih	Persentase
1	Sangat Mempengaruhi	7	23.3%
2	Mempengaruhi	11	36.6%
3	Biasa Saja	12	40%
4	Tidak Mempengaruhi	0	0%
5	Sangat Tidak Mempengaruhi	0	0%
Jumlah		30	100%

Sumber : Hasil Penelitian

Table tersebut diatas menunjukkan bahwa faktor isu kebijakan/janji politik biasa saja (40%), sedangkan mempengaruhi (36.6%) dalam mempengaruhi pemilih dalam menentukan pilihan dipilkada gubernur dan wakil gubernur Kalimantan utara.

B. Penerapan Prinsip Partisipasi

Prinsip partisipasi yaitu proses keterlibatan masyarakat dalam pembangunan, baik dalam menentukan materi apa yang akan dibangun (perumusan dan pengambilan kebijakan), merencanakan, melaksanakan, melakukan pengawasan dan evaluasi dan menikmati hasil-hasil pembangunan. Prinsip partisipasi menjadi penting untuk mengetahui keterlibatan pemerintah dan masyarakat dalam penyelenggaraan pemilu pada yang pertama di Kalimantan Utara. Berikut adalah pembahasan penulis mengenai penerapan prinsip partisipasi dalam pemilu pada Kalimantan Utara

1. Partisipasi memilih masyarakat di Kalimantan Utara sangat tinggi dilihat faktor pertama kalinya masyarakat memilih Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltara. Hal ini lah yang membuat euforia yang sangat tinggi bagi masyarakat. Dilihat dari hasil penelitian dimana 60% masyarakat aktif dan 33.3% masyarakat sangat aktif, ini merupakan angka yang sangat tinggi dalam hal partisipasi masyarakat. Hal ini kita sadari bahwa budaya masyarakat Kaltara peduli dengan pemilihan umum. Timbulnya konflik dalam Pilkada 2015 adalah karena kecemburuan salah satu pasangan calon terhadap lawan politiknya.
2. Pengawasan kampanye harus dilakukan oleh pihak penyelenggara pemilu pada dalam hal ini adalah KPUD Kalimantan Utara, agar mencegah terjadinya tindakan hal curang atau yang merugikan masyarakat. KPUD harusnya berpartisipasi aktif dalam pengawasan kampanye di Kalimantan Utara yang mempunyai partisipasi yang tinggi. Dalam hasil penelitian penulis terlihat

bahwa setengah dari responden merasa KPUD aktif, dan cukup besar merasa KPUD biasa saja 36.6%. KPUD membantu masyarakat untuk lebih dekat dengan peserta pemilu dan membantu masyarakat untuk menentukan pilihan yang terbaik. Pelaksanaan kampanye cukup bersemarak di sekitar wilayah Provinsi Kalimantan Utara, apalagi ini untuk pertama kali dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.

3. Pengawasan pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara di tugaskan kepada penyelenggara yaitu KPUD, penyelenggara harusnya berpartisipasi aktif dalam pengawasan. Dari hasil penelitian penulis terlihat bahwa masyarakat merasa KPUD aktif 76.6% dan bahkan sangat aktif yaitu 20%. Dari data penelitian tersebut terlihat bahwa KPUD sudah sangat aktif sampai saat pemilukada berlangsung hingga selesai. KPUD sudah cukup mampu mengawal serangkaian pelaksanaan Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara Tahun 2015 hingga selesai. Hal ini karena seluruh lapisan masyarakat sesuai dengan pengarahan KPUD bersepakat untuk mengawal pemilukada senantiasa aman pada mulanya, sedangkan konflik muncul sesudah penghitungan. Walaupun sebenarnya tugas pengawasan pemilukada harus dilakukan semua pihak pemilih, penyelenggara, dan peserta.
4. Menangkap aspirasi dari para pemilih adalah tugas daaari penyelenggara yaitu KPUD, bagaimana masyarakat harus merasa diperhatikan oleh pemerintah, aspirasi masyarakat harusnya diterima oleh KPUD untuk melaksanakan

pemerintahan yang baik. Dalam hasil penelitian penulis terlihat bahwa, dalam hal menangkap aspirasi masyarakat merasa KPUD aktif 60%, dan biasa saja cukup besar yaitu 30%, Masyarakat merasa aspirasinya sudah aktif di tanggap oleh pelaksana pemilu dalam hal ini KPUD. Hal ini juga berarti karena calon penguasa di Kalimantan Utara ini begitu juga masyarakat yang belum terlalu peduli dengan usaha mengartikulasikan dan menagregasikan kepentingan masyarakat. Untuk itu juga hendaknya KPUD didalam penjelasannya akan arti penting pemilu harus menyampaikan bahwa yang akan dipilih nanti adalah pemimpin yang peduli dengan masyarakat.

C. Penerapan Prinsip Responsibilitas

Prinsip Responsibilitas yaitu daya tanggap proses yang dilakukan di setiap institusi harus diarahkan pada upaya untuk melayani berbagai pihak yang berkepentingan. Bagaimana dalam hal penyelenggaraan pilukada yang dilakukan provinsi termuda di Indonesia. Prinsip responsibilitas menjadi tolak ukur yang strategis dalam mengetahui bagaimana penyelenggara pilukada menanggapi kebutuhan, keluhan dan menyelesaikan persoalan masyarakat sebagai pemilih.

1. Responsibilitas atau menanggapi kebutuhan masyarakat di pilukada Kalimantan Utara. Dimana harusnya penyelenggara dalam hal ini KPUD harus cepat tanggap menanggapi kebutuhan masyarakat Kalimantan Utara yang pertama kali menyelenggarakan pemilu dengan euphoria yang sangat besar. Dalam hasil penelitian yang dilakukan penulis terlihat bahwa masyarakat

merasa KPUD tanggap 63.3% dan sangat tanggap 13.3% angka yang menunjukkan bagaimana penyelenggara pemilukada menanggapi dengan aktif kebutuhan masyarakat di Kalimantan Utara. Masyarakat merasa cukup puas kepada KPUD dalam dal menanggapi kebutuhan masyarakat dalam Pilkada serentak tahun 2015. Analisis penulis adanya pihak yang mengatakan tidak tanggap baik pemerintah dan masyarakat adalah karena mereka belum merasakan arti kebutuhan demokratisasi karena selama ini mereka hanya sibuk dengan euphoria pesta pora arak-arakan kampanye.

2. Responsibilitas atau daya tanggap penyelenggara pemilukada Kalimantan Utara harusnya tanggap menanggapi keluhan dari masyarakat yang dalam hal ini sebagai pemilih di pilkasa serentak. Dalam hasil penelitian penulis terlihat bahwa KPUD dalam menanggapi keluhan daari masyarakat adalah biasa saja 46%, dan sangat tanggap 33.3%, malah hanya sebagian ke;lompok masyarakat yang merasa KPUD sangat tanggap dalam menanggapi keluhannya. Masyarakat yang mengeluh dan juga tidak mengeluh tentang kinerja KPUD dalam hal menanggapi keluhan-keluhan masyarakat. Keluhan umumnya mengenai terindikasinya politik uang dan kecurangan-kecurangan dari calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara apalagi dari tim sukses masing-masing peserta. Masyarakat berpendapat keluhan-keluhan tersebut kurang didengar oleh KPUD Kalimantan Utara.
3. Responsibilitas atau daya tanggap dalam hal ini menyelesaikan persoalan di pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur pertama Kalimantan Utara harusnya

menjadi bagian penting dari penyelenggara agar keadaan selalu kondusif. Dari hasil penelitian yang penulis lakukan terlihat bahwa hasil respon terdistribusi rata dan tidak menonjol di satu pilihan, dimana sangat tanggap 30%, biasa saja 20%, dan tidak tanggap 16%, hal ini menjadi kekhawatiran penulis dimana terlihat masyarakat ada yang merasa bahwa persoalan tidak di tanggap dengan cepat, dan hal inilah yang menimbulkan konflik. Banyak pihak di Kalimantan Utara menganggap bahwa penyelesaian persoalan adalah tugas pemerintah sehingga semua pihak masing-masing sama-sama menunggu petunjuk pergerakan dari tugas yang berwenang kendati semua pihak berhak memberikan masukan.

D. Penerapan Prinsip Transparansi

Prinsip transparansi adalah adanya kemudahan masyarakat mengakses informasi, terbuka terhadap pengawasan, dan adanya keterbukaan dalam proses pelayanan publik maupun berbagai peraturan perundangan lainnya. Prinsip transparansi mempunyai posisi penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dimana dua pihak saling berlomba memperebutkan kekuasaan, penyelenggara harus membangun kepercayaan masyarakat yang sedang dalam kondisi sensitif agar tidak menimbulkan praduga takbersalah kepada pemerintah.

1. Transparansi penyelenggara dalam memberikan akses informasi dalam pemerintahan Kalimantan harusnya menjadi bagian penting, untuk memberikan informasi yang seluas-luasnya tentang adanya pemerintahan Gubernur dan

Wakil Gubernur Kalimantan Utara, agar masyarakat dapat mengetahui informasi penting dalam penyelenggaraan. Dalam hasil penelitian penulis, terlihat bahwa KPUD sebagai penyelenggara sudah memberikan akses informasi yang banyak 56.6%. Namun yang merasa biasa saja ada 16.6%, analisa penulis kurangnya akses informasi pemilukada di Kalimantan Utara karena tidak tersedianya sarana untuk hal tersebut.

2. Transparansi atau keterbukaan dalam hal ini adalah aparatur KPUD yang diinginkan terbuka kepada masyarakat tentang penyelenggaraan pemilukada. Hasil penelitian penulis adalah KPUD sudah terbuka 50%, namun cukup besar yang merasa KPUD biasa saja yaitu 30%, KPUD terbuka kepada masyarakat pada penyelenggaraan pemilukada. Munculnya angka 3% ada yang menilai KPUD masih tertutup karena ditengarai KPUD masih bermain sebelah mata dengan partai tertentu terutama partai yang mendukung calon kapala daerah.
3. Transparansi keterbukaan dana kepada masyarakat dalam penyelenggaraan pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara sangatlah penting dimana penyelenggara membangun kepercayaan kepada masyarakat. Dalam penyelenggaraan pemilukada yang sangat sensitif dan penuh intrik, KPUD harus mampu membangun kepercayaan. Dalam hasil penelitian penulis terlihat bahwa keterbukaan dana sangat sedikit yaitu terbuka oleh 33.3% responden saja, sementara biasa saja 40%. Ditengarai KPUD masih belum terbuka tentang pertanggung jawaban dana baik kepada masyarakat maupun atasan mereka.

4. Sosialisasi KPUD kepada masyarakat tentang penyelenggaraan pemilukada sangat penting. Sosialisasi dari KPUD sebagai penyelenggara bisa dari berbagai media yaitu cetak, elektronik, media sisial, penyuluhan atau dari pintu ke pintu. Agar semua masyarakat bisa tahu tentang segala informasi tentang penyelenggaraan pemilukada. Dalam hasil penelitian penulis terlihat bahwa KPUD sudah bersosialisasi yaitu 63.3% serta sangat bersosialisasi 20%. Hal ini menunjukkan peran KPUD sudah menjalankan erannya untuk bersosialisasi kepada masyarakat. Secara umum masyarakat merasa KPUD sudah bersosialisasi.

E. Penerapan Prinsip Kesetaraan

Kesetaraan/Equity, yaitu semua warga Negara, tanpa memandang latar belakang mempunyai kesempatan untuk meningkatkan atau menjaga kesejahteraan mereka. Prinsip kesetaraan juga akan langsung dirasakan masyarakat sebagai pemilih yang datang untuk menggunakan hak suaranya, dimana penyelenggara harus memperlakukan secara setara dan tidak berat sebelah ke pihak manapun.

1. Kesetaraan dalam penyelenggaraan pemilukada di Kalimantan Utara sangat penting dimana masyarakat di kalimantan utara yang terdiri dari berbagai macam suku dan budaya serta golongan harus diperlakukan setara oleh penyelenggara tidak ada yang merasa KPUD berat sebelah kepada pihak manapun. Dalam hasil penelitian penulis terlihat bahwa perlakuan adil dirasa oleh masyarakat sebagian besar yaitu 56.6%, serta biasa saja 26.6%. Artinya

secara umum masyarakat merasa puas kepada KPUD dalam hal perlakuan adil/setara dalam pilkada serentak tahun 2015.

F. Penerapan Prinsip Penerapan Hukum

Penerapan hukum yaitu adanya kerangka hukum yang diperlukan untuk menjamin hak warga Negara dalam menegakkan supremasi hukum oleh pemerintah Prinsip penerapan hukum sebagai pengawal jalannya penyelenggaraan pilkada oleh pemerintah dalam hal ini KPUD untuk mencegah hal-hal yang tidak di inginkan yang hanya akan merugikan masyarakat banyak di Kalimantan Utara.

1. Penerapan hukum oleh KPUD sebagai penyelenggara kepada anggotanya sendiri yang bertindak diluar tugasnya sebagai penyelenggara sebagai tolak ukur ketegasan penyelenggara yang independen. Dimana oknum dari KPUD jika melakukan penyalahgunaan wewenang harus juga ditindak tegas. Dalam hasil penelitian penulis terlihat bahwa masyarakat merasa KPUD tegas 40%, namun juga biasa saja 36.6%, serta munculnya angka 10% dalam tidak tegas karena KPUD ketika berhadapan dengan sengketa hanya mampu menyelesaikan sesaat tetapi tidak mencari akar masalah.
2. Penerapan hukum kepada tindakan anarkis yang dilakukan beberapa pihak siapapun itu haruslah di tindak tegas, karena tindakan anarkis tidak diperbolehkan dan hanya merugikan masyarakat umum, semua sudah ada tata cara dan prosedur keterberatan terhadap penyelenggaraan pilkada. Dalam hasil penelitian penulis terlihat bahwa masyarakat merasa KPUD sudah tegas

yaitu 43.3%, serta sangat tegas 46.6%. menunjukkan bahwa penyelenggaraan pemilukada di Kalimantan Utara dirasa masyarakat dalam penegakan hukum untuk tindakan anarkis sudah sangat tegas, dilihat dari terjadinya konflik dalam penyelenggaraan tetapi langsung di tindak tegas oleh aparat yang berwenang serta KPUD. Artinya masyarakat merasa KPUD sangat tegas menangani tindakan anarkis dalam menyelenggaraan pemilukada tahun 2015.

G. Figgur Penyelenggara

KPU merupakan lembaga independen, memiliki kewenangan untuk mengatur mekanisme jalannya pemilu. Begitu juga dengan KPU Provinsi Kalimantan Utara dalam menjalankan tugasnya independen. Maka terkait penyelenggaraan pilkada Kalimantan Utara yang dijadwalkan pada tanggal 9 Desember 2015.

1. KPUD dalam penyelenggaraan pemilukada gubernur dan wakil gubernur

Kalimantan utara yang pertama menjadi tantangan tersendiri. Dalam hasil penelitian penulis terlihat bahwa masyarakat merasa KPUD memadai 83.3%, serta sangat memadai 13.3%. Masyarakat merasa KPUD secara keseluruhan memadai dalam melaksanakan Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara.

H. Faktor Pemilih

Pemilih dalam hal ini adalah masyarakat di Kalimantan Utara, yang terdiri dari 4 Kabupaten dan 1 Kota Madya. Dimana pembentukan dari provinsi ini disahkan pada tahun 2012, namun di tahun 2015 barulah Kalimantan Utara diharuskan memilih Gubernur dan Wakil Gubernurnya. Faktor apa saja yang nantinya bisa menentukan pemilih untuk memilih calon Gubernur dan Wakil Gubernurnya.

3. Faktor partai politik sebagai pengusung calon Gubernur dan Wakil Gubernur. Dimana partai politiklah yang menjadi tim sukses masing-masing pasangan calon. Dalam hasil penelitian penulis terlihat bahwa faktor partai politik mempengaruhi 43.3%, serta sangat mempengaruhi 33.3%. terlihat bahwa di Kalimantan Utara masyarakatnya masih terpengaruh oleh partai politik yang mengusung pasangan calon. Menunjukkan bahwa faktor partai politik mempengaruhi.
4. Faktor figur kandidat dalam hpemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara yang diikuti oleh dua pasangan calon yaitu Irianto Lambrie-Udin Hianggio dan Jusuf SK-Marthin Billa. Dimana faktor dari kedua pasangan calon ini mempengaruhi pemilih dalam menentukan pilihannya. Dalam hasil penelitian penulis terlihat bahwa faktor kandidat sangat mempengaruhi yaitu 66.6% serta mempengaruhi 30% terlihat bahwa figure dari kandidat sangat mempengaruhi pemilih di Kalimantan Utara.

5. Faktor isu kebijakan/janji politik oleh pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam mempengaruhi pemilih untuk menentukan pilihannya. Dalam hasil penelitian penulis terlihat bahwa faktor isu kebijakan dan janji politik biasa saja 40% serta mempengaruhi 36.6%. Hal ini menunjukkan mayoritas jawaban yakin bahwa isu kebijakan/janji politik tidak begitu mempengaruhi dalam menentukan pilihan di pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara.